

## MEMBUKA RIMBA MENJEMPUT ASA: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DI SUNGAI BAHAR TAHUN 1984–2000

Rahmat Firdaus<sup>1</sup>, Fajar Nanda Pratama<sup>2</sup>, Fatonah<sup>3</sup>, Padhil Hudaya<sup>4</sup>

[rahmatfirdaus556@gmail.com](mailto:rahmatfirdaus556@gmail.com)<sup>1</sup>, [nandafajarnanda903@gmail.com](mailto:nandafajarnanda903@gmail.com)<sup>2</sup>, [fatolah.nurdin@unja.ac.id](mailto:fatolah.nurdin@unja.ac.id)<sup>3</sup>, [padhilhudaya@unja.ac.id](mailto:padhilhudaya@unja.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Jambi

### ABSTRAK

Kisah transmigrasi yang digulirkan pemerintah era Orde Baru di kawasan Sungai Bahar, Provinsi Jambi, sejatinya bukan sekadar urusan memindahkan penduduk dari satu pulau ke pulau lain. Agenda besar ini merupakan cetak biru dari ambisi pemerintah dalam memadukan penataan demografi dengan ekspansi industri perkebunan kelapa sawit lewat skema PIR-Trans. Penelitian ini bertujuan untuk merajut kembali rekam jejak sejarah pembukaan lahan, dinamika penempatan gelombang awal, strategi bertahan hidup para migran, hingga titik balik kemandirian mereka di Sungai Bahar dari tahun 1984 sampai 2000. Dengan bersandar pada metode penelitian sejarah yang bertumpu penuh pada studi dokumen mulapi dari penelusuran heuristik, kritik sumber tertulis, interpretasi, hingga historiografi kajian ini membedah ragam arsip hukum daerah, catatan monografi desa, serta literatur hasil riset terkait sebagai fondasi data tertulisnya. Hasil kajian memperlihatkan bahwa metamorfosis wilayah dari hutan belantara yang mulanya menjadi ruang hidup Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan hingga mewujud sebagai kawasan agropolitan mandiri, harus dibayar dengan pengorbanan kemanusiaan yang teramat besar. Pekatnya isolasi geografis dan carut-marutnya infrastruktur di masa awal memaksa para transmigran memutar otak dan bekerja ekstra keras demi bisa beradaptasi. Kendati demikian, memasuki akhir dekade 1990-an, manisnya hasil panen kelapa sawit yang bermitra dengan PTPN VI perlahan mampu mendongkrak kesejahteraan warga, merubah wajah sosiologis wilayah menjadi lebih majemuk (heterogen), sekaligus mematangkan kesiapan administratifnya untuk berdiri sebagai kecamatan mandiri pada tahun 2001.

**Kata Kunci:** Transmigrasi, Sungai Bahar, PIR-Trans, Studi Dokumen, Kelapa Sawit.

### ABSTRACT

*The transmigration program launched by the Orde Baru government in Sungai Bahar, Jambi Province, was far more than a simple population relocation project. This massive initiative served as a master plan combining demographic restructuring with the aggressive expansion of the palm oil industry under the PIR-Trans scheme. This study aims to reconstruct the historical narrative of early land clearing, the dynamic resettlement phases, the survival mechanisms of the migrants, and their eventual transition to self-reliance in Sungai Bahar from 1984 to 2000. Applying a historical research method strictly rooted in documentary analysis encompassing heuristics, source criticism of written texts, interpretation, and historiography this paper examines various local regulatory archives, village monographs, and related research literature as its solid data foundation. The findings reveal that the regional transformation from a dense jungle originally home to the Indigenous Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan into a thriving agropolitan hub came at the cost of immense human sacrifice. In the opening years, severe geographical isolation and deep infrastructural deficits forced transmigrants to continuously innovate just to survive. By the late 1990s, however, the economic triumphs of palm oil cultivation in partnership with PTPN VI gradually elevated the community's livelihood, reshaping the area's sociological landscape into a vibrant, heterogeneous society while seamlessly laying the administrative groundwork for its*

*official district status in 2001.*

**Keywords:** *Transmigration, Sungai Bahar, PIR-Trans, Document Study, Palm Oil.*

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan kependudukan di Indonesia selalu berkelindan dengan upaya penataan ruang hidup dan pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan stabilitas nasional, di mana salah satu manifestasi paling nyata dari ambisi tersebut adalah program transmigrasi yang digulirkan secara masif oleh pemerintah Orde Baru. Secara historis, program pemindahan manusia antarpulau ini bukanlah sebuah penemuan baru yang lahir murni dari pemikiran para perancang kebijakan era 1980-an, melainkan dapat ditarik jauh ke belakang pada awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan kebijakan *kolonisasi* pada tahun 1905. Kala itu, motif utama Belanda adalah untuk mengurai kepadatan penduduk di ceruk-ceruk kemiskinan Pulau Jawa sekaligus menyuplai tenaga kerja murah bagi kawasan perkebunan swasta milik korporasi Barat di Sumatra. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, warisan konsep kolonisasi ini diadopsi namun mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar, di mana transmigrasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen demografi untuk memindahkan angka statistik kependudukan, melainkan diubah menjadi strategi geopolitik-ekonomi integratif yang bertujuan untuk mereduksi kemiskinan struktural masyarakat agraris, mengamankan wilayah pedalaman, serta mempercepat laju industrialisasi sektor pertanian di luar Pulau Jawa<sup>1</sup>. Dalam konteks pembangunan nasional era tersebut, wilayah luar Jawa dipandang sebagai hamparan potensi ekonomi yang belum tergarap optimal akibat minimnya faktor produksi berupa tenaga kerja, sedangkan Pulau Jawa yang mengalami ledakan penduduk di sisi lain memiliki surplus tenaga kerja pertanian namun didera kelangkaan kepemilikan lahan. Oleh karena itu, transmigrasi dirancang sebagai jembatan ekologis dan ekonomi untuk mempertemukan surplus tenaga kerja dari Jawa dengan kekayaan spasial di luar Jawa, sebuah pola yang diharapkan mampu menciptakan efek domino berupa pertumbuhan ekonomi regional yang berpusat pada sektor agraria berskala besar.

Dalam peta persebaran transmigrasi nasional, wilayah Sumatra bagian tengah, khususnya Provinsi Jambi, memegang peranan yang teramat strategis dan telah dikondisikan sebagai salah satu kantong penerima aliran migrasi yang cukup intensif sejak bergulirnya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tahap awal karena dinilai memiliki daya dukung lingkungan yang sangat baik untuk pengembangan sektor agrikultur darat. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin menyusutnya ketersediaan cadangan lahan subur di sekitar pusat-pusat kota lama, pemerintah pusat melalui Departemen Transmigrasi mulai mengalihkan kompas pembangunannya ke wilayah pedalaman terisolasi yang berada di hulu Kabupaten Batanghari. Pada kisaran tahun 1984, perhatian negara secara resmi tertuju pada sebuah bentang alam luas terisolasi yang dikenal sebagai kawasan Sungai Bahar, yang sebelum deru mesin-mesin berat proyek masuk membelah kesunyian wilayah tersebut, merupakan sebuah hamparan hutan belantara alami atau dalam memori kolektif lokal disebut sebagai rimba mentah yang sangat lebat. Jauh dari citra tanah kosong tak berpenghuni yang sering digambarkan dalam brosur-brosur formal, ekosistem hutan ini sejatinya merupakan ruang hidup kebudayaan, wilayah jelajah berburu, sekaligus wilayah kedaulatan adat yang sakral bagi kelompok masyarakat asli Suku Anak

---

<sup>1</sup> Hanif Risa Mustafa et al., "From Oral to Archive: Documentation of the Transmigrant Experience of Sungai Bahar, Jambi Province," *Proceeding of the 2nd International Seminar on Language, Literature, Arts and Culture (ISOLLEAC)* (2024): 21–22.

Dalam (SAD) Batin Sembilan<sup>2</sup>. Konversi hutan belantara menjadi pemukiman transmigrasi ini tidak hanya mengubah ekologi fisik, tetapi juga menandai dimulainya babak baru dalam sejarah agraria di Jambi, di mana kawasan hulu yang semula mengandalkan sistem ekonomi perhutanan tradisional kini dipaksa masuk ke dalam sirkulasi ekonomi pasar modern yang terorganisir, sekaligus mempertemukan komunitas adat lokal dengan gelombang kebudayaan baru yang dibawa oleh para pendatang dari luar pulau, menciptakan sebuah dinamika ruang sosial yang kompleks sejak awal pembukaannya.

Berbeda dengan pola transmigrasi umum generasi awal di wilayah lain yang berfokus pada sektor pertanian pangan atau pemukiman lahan basah, Sungai Bahar sejak awal didesain sebagai lanskap perkebunan modern skala besar dengan komoditas tunggal berupa kelapa sawit melalui skema hibrida yang mengawinkan program kependudukan dengan kepentingan industri perkebunan negara lewat pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), yang payung hukumnya diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986. Pola kemitraan ini membagi aktor lapangan menjadi dua komponen utama, di mana para transmigran diposisikan sebagai petani plasma yang mengelola lahan jatah perkebunan, sedangkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI bertindak sebagai perusahaan inti yang memegang kendali atas bimbingan teknis, pengolahan, dan penyerapan hasil panen, dengan sokongan dana talangan awal dari Bank Exim<sup>3</sup>. Konsep PIR-Trans ini pada dasarnya mengeliminasi kelemahan transmigrasi pola pangan konvensional yang sering kali gagal karena keterbatasan akses pasar, karena dengan menempatkan korporasi negara sebagai "inti", para petani "plasma" mendapatkan kepastian hukum dan ekonomi bahwa komoditas yang mereka tanam akan selalu terserap oleh industri, meskipun skema ini juga mengikat para transmigran dalam sistem utang piutang jangka panjang sejak awal penempatan karena seluruh biaya pembukaan lahan, bibit, hingga pembangunan rumah RSS bersubsidi dikalkulasikan sebagai kredit awal yang harus dicicil dari potongan hasil panen di kemudian hari. Setelah infrastruktur dasar pemukiman rampung dipersiapkan, gelombang manusia mulai didatangkan secara bertahap dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana agar proses asimilasi berjalan kondusif dan mencegah potensi konflik agraria dengan penduduk lokal, pemerintah menerapkan strategi rekayasa sosial dengan mencampurkan masyarakat sipil asal Jawa, unsur purnawirawan ABRI yang diplot sebagai struktur perintis administrasi desa, serta masyarakat lokal perwakilan Jambi melalui skema Transmigrasi Lokal (Transloke), seperti yang terjadi di Desa Marga Manunggal Jaya (Unit XIII) yang menerima penempatan gelombang besar sekitar 500 Kepala Keluarga pada medio Juli 1989.

Namun, lembaran sejarah yang tertulis dalam realitas sehari-hari para transmigran di lapangan sering kali bertolak belakang dengan potret ideal kemakmuran yang dijanjikan pemerintah di daerah asal, karena tahun-tahun awal penempatan di Sungai Bahar adalah fase kritis yang dipenuhi getirnya perjuangan fisik dan benturan psikologis akibat isolasi geografis yang sangat pekat. Jaringan transportasi yang ada hanyalah jalan tanah merah bekas jalur logging korporasi kayu yang akan berubah menjadi kubangan lumpur pekat

---

<sup>2</sup> Mahdi Bahar, Selfi Mahat Putri, dan Fatonah Nurdin, "Budaya Melayu dalam Perspektif Sejarah pada Masa Orde Baru: Seni Budaya Suku Jawa Transmigran di Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi," *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh* 4, no. 2 (2020): 174–175.

<sup>3</sup> Muhammad Suhaibe dan Irhas Fansuri Mursal, "Transmigrasi Desa Marga Manunggal Jaya, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi 1988-2000," *Laporan Penelitian Pusat Kajian Melayu Universitas Jambi* (2020): 3.

setinggi lutut saat musim hujan tiba sehingga memutus total akses ke dunia luar, ditambah ketiadaan fasilitas sanitasi air bersih, belum adanya pasokan listrik dari PLN, keterbatasan jaminan hidup (jadup) yang sering terlambat datang, hingga serangan penyakit endemis mematikan seperti malaria yang menjadi santapan harian warga. Kerasnya alam ini pada akhirnya memaksa mereka untuk mengesampingkan perbedaan asal-usul kedaerahan di Jawa dan melebur dalam identitas baru sebagai sesama perantau yang senasib sepenanggungan melalui strategi bertahan hidup kolektif yang tumbuh secara organik, mulai dari sistem lumbung pangan darurat antar-tetangga hingga kerja bakti pembukaan jalur pintas transportasi secara swadaya tanpa menunggu bantuan dari otoritas pemerintah pusat. Mengingat begitu besarnya jurang antara ambisi politik makro pemerintah dan pengorbanan manusia di tingkat mikro, rekonstruksi sejarah mengenai Sungai Bahar dalam rentang waktu tahun 1984 hingga tahun 2000 menjadi hal yang sangat mendesak untuk diurai, di mana tahun 1984 menandai titik awal pengerjaan wilayah ketika tim survei agraria mulai memetakan rimba Bahar, sedangkan tahun 2000 diposisikan sebagai titik balik (*turning point*) penting ketika tanaman kelapa sawit para petani plasma mencapai puncak produktivitasnya, utang pinjaman bank berhasil dilunasi, dan masyarakat mulai mandiri secara finansial. Melalui kajian berbasis studi dokumen terhadap regulasi otonomi daerah, laporan monografi, dan literatur sejarah terkait, artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas dinamika pembukaan lahan, proses kedatangan gelombang migrasi, strategi adaptasi sosial-ekonomi di tengah keterbatasan sarana publik, hingga perubahan struktur kemasyarakatan yang melandasi lahirnya Kecamatan Sungai Bahar yang berdaulat pada tahun 2001.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian historis mengenai perkembangan wilayah eks-transmigrasi ini sepenuhnya bersandar pada metode penelitian sejarah konvensional yang dioperasikan secara ketat melalui empat tahapan prosedural, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Mengingat penelitian ini dilaksanakan tanpa melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung, fokus utama pada tahap heuristik diarahkan murni pada pengumpulan sumber tertulis (*documentary studies*) yang memiliki otoritas data kuat terkait wilayah Sungai Bahar. Ragam data tekstual yang berhasil dihimpun meliputi dokumen hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Bahar, laporan monografi resmi tingkat desa seperti catatan sejarah Desa Marga Manunggal Jaya, serta artikel jurnal ilmiah dan hasil riset terdahulu yang mengupas dinamika sosio-ekonomi masyarakat transmigran di kawasan tersebut<sup>4</sup>. Setelah seluruh material teks terkumpul, proses dilanjutkan ke tahap kritik sumber yang mencakup verifikasi eksternal untuk menguji keaslian fisik dokumen serta kritik internal untuk membedah kredibilitas, objektivitas, dan validitas narasi yang terkandung di dalam teks agar terhindar dari bias informasi. Selanjutnya, pada tahap interpretasi, data tertulis yang telah dinyatakan sah kemudian dianalisis keterkaitannya satu sama lain dengan menggunakan pendekatan sosiologi interpretatif, khususnya memanfaatkan pisau analisis teori perubahan sosial Herbert Spencer mengenai evolusi

---

<sup>4</sup> Anny Wahyuni, Dewi Nurismawati, dan Muhammad Adi Saputra, "Pelestarian Tradisi dan Budaya Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa Propinsi Jambi (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Jatilan Unit V Sungai Bahar)," *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 2, no. 1 (2022): 42.

masyarakat dari bentuk yang homogen menuju struktur yang heterogen<sup>5</sup>. Melalui sintesis teoretis tersebut, data fakta dikonstruksikan secara kronologis untuk memahami rantai sebab-akibat dari kebijakan agraria pemerintah terhadap realitas kehidupan para perantau. Seluruh hasil penafsiran data tersebut akhirnya dituangkan dalam tahap historiografi, yakni penyusunan narasi sejarah yang bersifat analitis, deskriptif, dan sistematis mengenai pasang surut pemukiman transmigrasi Sungai Bahar sejak masa perintisan awal hingga tercapainya kemandirian wilayah pada tahun 2000.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembukaan Lahan dan Konstruksi Pola Kemitraan PIR-Trans (1984–1988)**

Proses perintisan fisik dan transformasi spasial radikal di kawasan Sungai Bahar dimulai pada kisaran tahun 1984 ketika pemerintah pusat melalui Departemen Transmigrasi mulai menurunkan tim agraria untuk melakukan survei kelayakan topografi serta mengeksekusi konversi status pemanfaatan hutan belantara di pedalaman Jambi. Karakteristik geografis wilayah Sungai Bahar yang didominasi oleh hamparan dataran rendah bergelombang serta jenis tanah podsolik merah kuning dinilai oleh para ahli pertanian negara sebagai sebuah ekosistem yang sangat ideal bagi ekspansi perkebunan komoditas kelapa sawit skala besar dalam jangka panjang. Guna merealisasikan megaprojek kependudukan tersebut, pemerintah meluncurkan operasi pembukaan lahan hutan primer secara bertahap dengan menebang pohon-pohon besar, membersihkan semak belukar, dan membagi hamparan kawasan raksasa ini ke dalam unit-unit pemukiman taktis yang kelak secara perlahan berkembang menjadi desa-desa definitif mulai dari Unit I sampai dengan Unit XXII. Berbeda secara fundamental dengan model transmigrasi pangan konvensional di wilayah lain yang umumnya menempatkan petani secara mandiri untuk menanam padi atau palawija, proyek transmigrasi Sungai Bahar sejak awal secara terstruktur mengadopsi skema ekonomi makro integratif yang dikenal sebagai pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi atau PIR-Trans, di mana landasan operasional hukumnya diperkuat secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986. Sistem kemitraan agraria ini mengawinkan dua lapis kepentingan ekonomi yang saling mengikat satu sama lain, di mana Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan yaitu PT Perkebunan Nusantara VI bertindak sebagai perusahaan inti yang memegang kendali atas standarisasi teknis, manajemen pembibitan, hingga pengolahan pabrik, sedangkan para transmigran yang didatangkan diposisikan sebagai petani plasma yang memegang hak kelola atas jatah Lahan I berupa pekarangan rumah tinggal dan Lahan II berupa hamparan kebun kelapa sawit yang sudah ditanami terlebih dahulu oleh pihak perusahaan inti. Seluruh pembiayaan modal investasi awal yang berskala besar untuk mendanai kegiatan operasional pembukaan hutan, pengadaan bibit sawit unggul, pupuk massal, hingga pembangunan fisik Rumah Sangat Sederhana bersubsidi sepenuhnya difasilitasi melalui sistem kredit dana talangan jangka panjang yang dikucurkan oleh Bank Exim<sup>6</sup>. Skema utang piutang kolektif yang mengikat ini mengonstruksikan bahwa segala pengeluaran finansial awal yang dialokasikan oleh negara akan dicatat sebagai beban utang pribadi para petani plasma, yang dalam klausul perjanjiannya wajib dicicil secara otomatis

---

<sup>5</sup> Muhammad Suhaibe dan Irhas Fansuri Mursal, "Transmigrasi Desa Marga Manunggal Jaya, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi 1988-2000," *Laporan Penelitian Pusat Kajian Melayu Universitas Jambi* (2020): 2.

<sup>6</sup> Muhammad Suhaibe dan Irhas Fansuri Mursal, "Transmigrasi Desa Marga Manunggal Jaya, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi 1988-2000," *Laporan Penelitian Pusat Kajian Melayu Universitas Jambi* (2020): 3.

melalui mekanisme pemotongan langsung dari persentase hasil penjualan Tandan Buah Segar ketika tanaman kelapa sawit tersebut telah melewati masa vegetatif dan memasuki Masa Menghasilkan di lapangan. Konstruksi pola PIR-Trans yang berjalan ketat dalam rentang tahun 1984 hingga 1988 ini pada akhirnya berhasil merubah total struktur keruangan ekologis rimba mentah Bahar menjadi sebuah lanskap perkebunan monokultur modern yang terorganisir rapi dan siap menerima kedatangan ribuan kepala keluarga perantau dari Pulau Jawa<sup>7</sup>.

## **2. Gelombang Kedatangan dan Komposisi Demografi Transmigran (1989)**

Mobilisasi massa secara masif menuju unit-unit pemukiman baru di kawasan Sungai Bahar mencapai salah satu puncaknya pada medio Juli tahun 1989, di mana prosesi pemberangkatan ribuan kepala keluarga dari Pulau Jawa diatur secara ketat lewat koordinasi berjenjang oleh Departemen Transmigrasi. Para calon transmigran yang mayoritas berasal dari daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta kerentanan ekonomi agraria seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dipaksa menjalani simulasi perjalanan panjang dan melelahkan yang memakan waktu berhari-hari. Alur pergerakan fisik para perantau ini dimulai dari stasiun-stasiun kereta api lokal di daerah asal menuju balai-balai transit penampungan utama, sebelum akhirnya diangkut menggunakan kapal-kapal laut sewaan pemerintah membelah Selat Sunda menuju Pelabuhan Jambi, untuk kemudian didistribusikan ke wilayah pedalaman Sungai Bahar dengan konvoi truk-truk kelompok melewati jalur darat yang sangat terjal. Setibanya di lokasi penempatan, otoritas berwenang segera mengeksekusi strategi rekayasa sosial-demografis yang telah dirancang sedemikian rupa guna mempercepat asimilasi kultural sekaligus meminimalisir potensi benturan agraria dengan penduduk tempatan. Komposisi warga di dalam unit pemukiman sengaja dikondisikan secara heterogen dengan mencampurkan tiga kluster sosiologis yang berbeda ke dalam satu wilayah desa binaan, yang terdiri atas kelompok masyarakat sipil asal berbagai sub-etnis Jawa, unsur purnawirawan tentara serta pensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diplot khusus memegang kendali kepemimpinan birokrasi awal desa perintisan, serta perwakilan masyarakat lokal Jambi melalui program Transmigrasi Lokal atau Transloke. Pola perpaduan demografis yang unik ini tergambar jelas dalam catatan monografi Desa Marga Manunggal Jaya atau yang secara administratif dikenal sebagai Unit XIII, di mana pada fase awal kedatangannya di tahun 1989, wilayah pemukiman baru ini langsung menampung kelompok heterogen berskala besar yang mencapai sekitar 500 Kepala Keluarga<sup>8</sup>. Eksperimen penempatan demografi terpadu ini pada satu sisi berhasil menekan ego kedaerahan masing-masing kelompok sejak hari pertama kedatangan, namun di sisi lain langsung menghadapi struktur masyarakat yang baru lahir ini pada ujian adaptasi sosial dan ketahanan hidup yang luar biasa berat di tengah keterpencilan rimba Sumatra<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Mahdi Bahar, Selfi Mahat Putri, dan Fatonah Nurdin, "Budaya Melayu dalam Perspektif Sejarah pada Masa Orde Baru: Seni Budaya Suku Jawa Transmigran di Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi," *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh* 4, no. 2 (2020): 176.

<sup>8</sup> Muhammad Suhaibe dan Irhas Fansuri Mursal, "Transmigrasi Desa Marga Manunggal Jaya, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi 1988-2000," *Laporan Penelitian Pusat Kajian Melayu Universitas Jambi* (2020): 1.

<sup>9</sup> Hanif Risa Mustafa et al., "From Oral to Archive: Documentation of the Transmigrant Experience of Sungai Bahar, Jambi Province," *Proceeding of the 2nd International Seminar on Language, Literature, Arts and Culture (ISOLLEAC)* (2024): 21.

### **3. Getirnya Realitas Awal: Krisis Infrastruktur dan Strategi Adaptasi Sosio-Ekonomis**

Lembaran awal kehidupan yang harus diarungi oleh para perantau sejak menginjakkan kaki di unit pemukiman Sungai Bahar menyajikan benturan yang sangat hebat antara ekspektasi kemakmuran dan getirnya realitas alam. Fase penempatan awal ini menjadi sebuah periode kritis yang dipenuhi oleh perjuangan fisik yang menguras energi serta tekanan psikologis akibat pekatnya isolasi geografis di tengah kepungan hutan rimba Jambi. Jaringan transportasi makro yang tersedia pada masa itu hanyalah berupa jalan tanah merah bekas jalur logging korporasi kayu yang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana akses jalan tersebut akan langsung berubah menjadi kubangan lumpur pekat setinggi lutut orang dewasa setiap kali musim hujan tiba sehingga memutus total urat nadi pergerakan logistik dan mobilitas warga menuju pusat kota. Selama menunggu tanaman kelapa sawit plasma tumbuh dan memasuki Masa Menghasilkan yang memakan waktu sekitar empat hingga lima tahun, para transmigran dipaksa memutar otak demi mempertahankan kelangsungan hidup keluarga mereka dengan mengandalkan Jaminan Hidup bersubsidi dari pemerintah berupa jatah beras, minyak goreng, dan minyak tanah yang distribusinya sendiri sering kali mengalami keterlambatan akut akibat kendala medan transportasi yang ekstrem. Menghadapi situasi yang serba terbatas tersebut, masyarakat secara organik mengembangkan strategi bertahan hidup kolektif dengan memanfaatkan Lahan I pekarangan rumah mereka untuk ditanami tanaman palawija, sayur-mayur, dan umbi-umbian demi menyambung kebutuhan pangan harian, di samping harus bergelut dengan krisis air bersih, ketiadaan pasokan listrik PLN, serta tingginya ancaman penyakit endemis mematikan seperti malaria yang menjadi santapan keseharian warga. Beratnya beban hidup dan keterisolasian yang ekstrem di masa awal penempatan ini pada akhirnya melahirkan dinamika sosial yang cukup pelik di dalam internal pemukiman, di mana muncul fenomena keputusasaan yang mendalam yang mendorong sebagian kepala keluarga memilih meninggalkan unit pemukiman mereka secara ilegal atau menjual aset rumah kayu jatah pemerintah dengan harga yang teramat murah demi bisa membeli tiket pulang ke daerah asal di Pulau Jawa<sup>10</sup>.

### **4. Jalinan Kultural dan Gelombang Migrasi Swakarsa Baru (Dekade 1990-an)**

Memasuki dekade 1990-an, dinamika kehidupan di pemukiman transmigrasi Sungai Bahar mulai menunjukkan geliat kultural yang menarik sebagai bentuk mekanisme pertahanan psikologis kolektif masyarakat dalam mengatasi rasa rindu pada kampung halaman yang mendalam. Tekanan mental akibat kerasnya adaptasi fisik di lingkungan baru perlahan diredam melalui pembentukan paguyuban seni tradisional etnis Jawa secara swadaya, di mana salah satu manifestasi budaya yang paling eksis dan mendapat antusiasme tinggi dari warga adalah kesenian rakyat Jatilan atau Kuda Lumping seperti yang mulai dihidupkan secara masif oleh kelompok Margo Mudo Budoyo di Unit V Sungai Bahar sejak tahun 1990. Pertunjukan rakyat yang sarat akan ritme ritmis gamelan dan atraksi magis komunal ini tidak sekadar berfungsi sebagai media hiburan pelepas jenuh, melainkan menjelma sebagai ruang katarsis sosial yang mempererat solidaritas mekanik antar-sesama perantau lintas-unit pemukiman. Seiring berjalannya waktu, eksistensi seni tradisional ini tidak menutup diri melainkan mengalami proses akulturasi

---

<sup>10</sup> Anny Wahyuni, Dewi Nurismawati, dan Muhammad Adi Saputra, "Pelestarian Tradisi dan Budaya Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa Propinsi Jambi (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Jatilan Unit V Sungai Bahar)," *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 2, no. 1 (2022): 44

budaya yang dinamis dengan lingkungan sekitar, di mana pertunjukan Jatilan mulai diterima oleh masyarakat asli Melayu Jambi dan secara berangsur mengadopsi instrumen musik modern guna merespon arus perkembangan zaman serta teknologi hiburan pada masa itu<sup>11</sup>. Geliat perubahan sosiologis di Sungai Bahar semakin bereskalasi secara signifikan menjelang akhir dekade 1990-an, tepatnya pasca-krisis moneter tahun 1998, ketika keberhasilan ekonomi perkebunan sawit di wilayah ini mulai terdengar luas ke luar Provinsi Jambi. Fenomena kemakmuran hijau tersebut memicu gelombang migrasi baru yang bersifat swakarsa atau mandiri, ditandai dengan masuknya suku Batak Toba secara masif ke wilayah Bahar sejak tahun 1999. Para migran swakarsa dari tanah Toba ini umumnya datang secara mandiri dengan modal finansial seadanya, menyewa lahan, atau bekerja sebagai buruh harian dodos sawit terlebih dahulu sebelum akhirnya mampu mengumpulkan modal untuk membeli lahan perkebunan mereka sendiri. Kehadiran etnis Batak yang membawa tatanan adat dan sistem kekerabatan tersendiri ini secara drastis mengubah struktur kemasyarakatan Sungai Bahar dari yang semula didominasi etnis Jawa homogen menjadi potret masyarakat yang sangat heterogen, di mana interaksi sosial sehari-hari kemudian berjalan dinamis di atas prinsip toleransi dan ruang integrasi berbasis kepentingan ekonomi bersama dalam industri kelapa sawit<sup>12</sup>.

#### **5. Titik Balik Manisnya Sawit dan Gerbang Kemandirian Wilayah (Menuju Tahun 2000)**

Rentang waktu menjelang tahun 2000 menjadi titik balik yang sangat krusial bagi transformasi struktur sosiologis dan eskalasi kesejahteraan finansial masyarakat eks-transmigrasi di Sungai Bahar, di mana tanaman kelapa sawit yang mereka rawat sejak masa perintisan awal telah memasuki usia produktif puncak dengan hasil Tandan Buah Segar yang melimpah. Keberhasilan swasembada ekonomi di tingkat tapak ini tidak lepas dari bimbingan teknis intensif dan berkala yang diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara VI selaku perusahaan inti, yang secara konsisten mengedukasi para petani plasma mengenai standarisasi teknik pemeliharaan, sistem pemupukan makro yang tepat, hingga tata cara pemanenan kelapa sawit yang efektif guna mendongkrak kualitas produksi harian. Lonjakan pendapatan yang dialami oleh para petani plasma berimplikasi langsung pada percepatan pelunasan beban kredit dana talangan di Bank Exim, di mana mayoritas kepala keluarga eks-transmigran tercatat mampu menyelesaikan seluruh sangkutan utang investasi modal awal mereka jauh lebih cepat daripada batas tenor waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian awal oleh pemerintah<sup>13</sup>. Kemandirian finansial yang diraih ini seketika merubah total potret kemiskinan dan keterbelakangan wilayah, yang secara visual ditandai dengan masifnya aktivitas renovasi rumah jatah pemerintah yang semula berbahan kayu RSS menjadi bangunan permanen berdinding beton kokoh, meluasnya kepemilikan aset transportasi kendaraan bermotor untuk mendukung mobilitas harian, serta lahirnya kesadaran kolektif yang tinggi dalam internal keluarga transmigran untuk mengirimkan generasi kedua mereka menempuh jalur pendidikan formal hingga ke jenjang perguruan

---

<sup>11</sup> Anny Wahyuni, Dewi Nurismawati, dan Muhammad Adi Saputra, "Pelestarian Tradisi dan Budaya Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa Propinsi Jambi (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Jatilan Unit V Sungai Bahar)," *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 2, no. 1 (2022): 44–45.

<sup>12</sup> Juhari Natal Sibuea dan Denny Defrianti, "Migrasi Suku Batak ke Daerah Bahar Muaro Jambi," *Siginjai: Jurnal Sejarah* 2, no. 1 (2022): 67–69.

<sup>13</sup> Muhammad Suhaibe dan Irhas Fansuri Mursal, "Transmigrasi Desa Marga Manunggal Jaya, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi 1988-2000," *Laporan Penelitian Pusat Kajian Melayu Universitas Jambi* (2020): 1–3.

tinggi baik di pusat Kota Jambi maupun di kota-kota besar Pulau Jawa. Sejalan dengan kemakmuran ekonomi kelapa sawit yang kian mapan serta pertumbuhan kepadatan demografi yang melonjak tajam, status administratif wilayah ini mengalami reorganisasi total, di mana sistem pengawasan ketat yang sebelumnya dipegang penuh oleh Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi sepenuhnya dihapus dan diserahkan kepada struktur pemerintahan desa mandiri yang otonom. Lonjakan volume kegiatan pembangunan, kapasitas ekonomi, serta kemandirian tata kelola pemerintahan desa di bawah wilayah kerja administratif Kecamatan Mestong ini pada akhirnya menjadi argumentasi sosiologis dan legal yang sangat kuat bagi dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2001, yang secara resmi mengesahkan pemekaran kawasan ini berdiri tegak sebagai Kecamatan Sungai Bahar yang berdaulat secara otonom<sup>14</sup>.

## **KESIMPULAN**

Rekonstruksi sejarah mengenai dinamika pemukiman transmigrasi di Sungai Bahar dalam rentang waktu tahun 1984 hingga tahun 2000 memberikan sebuah pembuktian ilmiah bahwa keberhasilan penataan demografi berskala besar sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan komoditas ekonomi lokal serta integrasi pola kemitraan yang kuat antara masyarakat dan korporasi negara. Proses transformasi spasial yang radikal dari sebuah kawasan hutan belantara atau rimba mentah yang awalnya menjadi ruang hidup tradisional bagi komunitas adat Suku Anak Dalam Batin Sembilan menuju sebuah kawasan agropolitan modern, tidak berjalan secara instan melainkan harus ditebus dengan pengorbanan kemanusiaan serta perjuangan fisik yang luar biasa berat dari para transmigran generasi pertama. Pekatnya isolasi geografis, carut-marutnya infrastruktur transportasi berupa jalan tanah merah yang berubah menjadi kubangan lumpur pekat saat musim hujan, ketiadaan sanitasi air bersih, serta keterbatasan pasokan energi listrik menempatkan para perantau pada titik kritis pertahanan hidup di tahun-tahun awal penempatan. Namun demikian, penerapan skema Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi yang mengawinkan peran petani plasma dengan PT Perkebunan Nusantara VI sebagai perusahaan inti serta dukungan finansial Bank Exim, terbukti efektif bertindak sebagai katalisator kesejahteraan yang mampu mendongkrak ekonomi tapak secara drastis seiring dengan masuknya tanaman kelapa sawit pada usia produktif puncak menjelang akhir dekade 1990-an. Kemakmuran finansial dari hasil panen sawit tersebut tidak hanya berhasil menghapus utang kredit modal awal para petani lebih cepat dari waktu perjanjian, melainkan juga merubah total struktur sosial kemasyarakatan Sungai Bahar dari kondisi ekonomi homogen miskin menjadi lanskap masyarakat majemuk heterogen yang sejahtera, mandiri, serta memiliki kesadaran pendidikan formal yang tinggi bagi generasi keduanya. Fleksibilitas kultural melalui akulturasi kesenian tradisional seperti Jatilan serta ruang toleransi bagi masuknya gelombang migrasi swakarsa baru dari etnis Batak Toba pada tahun 1999, semakin memantapkan kohesi sosial masyarakat eks-transmigrasi. Kemandirian finansial dan kemapanan sosiologis tersebut pada akhirnya menjadi legitimasi kuat yang melandasi kesiapan administratif wilayah ini untuk dilepaskan dari status daerah binaan dan dimekarkan secara resmi sebagai Kecamatan Sungai Bahar yang berdaulat otonom pada tahun 2001, meskipun di sisi lain pertumbuhan ekonomi makro yang pesat tersebut secara kritis masih menyisakan pekerjaan rumah berupa rendahnya aksesibilitas fisik masyarakat ke fasilitas pelayanan publik primer akibat keterbatasan

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Bahar.

pembangunan jalan penghubung oleh pemerintah daerah pada masa itu<sup>15</sup>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, M., Putri, S. M., & Nurdin, F. (2020). Budaya Melayu dalam Perspektif Sejarah pada Masa Orde Baru: Seni Budaya Suku Jawa Transmigran di Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh*, 4(2), 174–184.  
<https://doi.org/10.22437/js.v2i1.18722>  
<https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/1612>  
<https://ejournal.sagita.or.id/index.php/beujroh/article/view/205/159>  
[https://ilmusejarah.unja.ac.id/home/?page\\_id=750](https://ilmusejarah.unja.ac.id/home/?page_id=750)  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage/article/view/7287/5037>  
<https://online-journal.unja.ac.id/jejak/article/download/20150/13989>  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/52956/perda-kab-muaro-jambi-no-39-tahun-2001>  
[https://www.researchgate.net/publication/343310116\\_BUDAYA\\_MELAYU\\_JAMBI\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_SEJARAH\\_PADA\\_MASA\\_ORDE\\_BARU](https://www.researchgate.net/publication/343310116_BUDAYA_MELAYU_JAMBI_DALAM_PERSPEKTIF_SEJARAH_PADA_MASA_ORDE_BARU)  
[https://www.scribd.com/document/957490637/9-Hanif-Risa-Mustafa-Dennys-Pradita-Inda-Lestari-Amor-Seta-Gilang-Pratama-Nugrahadi-Mahanani?\\_gl=1\\*30enad\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*NTY0ODE1MDY2LjE3Nzk3MTkxNzE.\\*\\_ga\\_Z4ZC50DED6\\*cze3Nzk3MTkxNzAkzEkZzEkdDE3Nzk3MTkxNzAkajYwJGwwJGgw\\*\\_ga\\_8KZ8BV0P5W\\*cze3Nzk3MTkxNzAkzEkZzEkdDE3Nzk3MTkxNzAkajYwJGwwJGgw](https://www.scribd.com/document/957490637/9-Hanif-Risa-Mustafa-Dennys-Pradita-Inda-Lestari-Amor-Seta-Gilang-Pratama-Nugrahadi-Mahanani?_gl=1*30enad*_up*MQ..*_ga*NTY0ODE1MDY2LjE3Nzk3MTkxNzE.*_ga_Z4ZC50DED6*cze3Nzk3MTkxNzAkzEkZzEkdDE3Nzk3MTkxNzAkajYwJGwwJGgw*_ga_8KZ8BV0P5W*cze3Nzk3MTkxNzAkzEkZzEkdDE3Nzk3MTkxNzAkajYwJGwwJGgw)
- Mustafa, H. R., Pradita, D., Lestari, I., Pratama, A. S. G., & Mahanani, N. (2024). From Oral to Archive: Documentation of the Transmigrant Experience of Sungai Bahar, Jambi Province. *Proceeding of the 2nd International Seminar on Language, Literature, Arts and Culture (ISOLLEAC)*, 21–27.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Bahar.
- Pradita, D., Mustafa, H. R., Lestari, I., Pratama, A. S. G., & Mahanani, N. (2024). Pendampingan Digitalisasi Ingatan Tentang Sejarah, Kesenian Dan Tradisi Warga Sungai Bahar. *Beujroh: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, 2(3), 393–403.
- Prodi Ilmu Sejarah Unja. (n.d.). *Sumber lisan - Ingatan masyarakat transmigrasi Sungai Bahar: Dokumentasi lisan pembangunan kawasan perkebunan sawit di Muaro Jambi*. PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH UNIVERSITAS JAMBI
- Sari, N., Parman, S., & Sriyono. (2015). Analisis Keruangan Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan di Daerah Eks-Transmigrasi Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. *Geo-Image*, 4(2), 27–38.
- Sibuea, J. N., & Defrianti, D. (2022). Migrasi Suku Batak ke Daerah Bahar Muaro Jambi. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 2(1), 67-79.
- Suhaibe, M., & Mursal, I. F. (2020). Transmigrasi Desa Marga Manunggal Jaya, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi 1988-2000. *Laporan Penelitian Pusat Kajian Melayu Universitas Jambi*, 1–15.
- Wahyuni, A., Nurismawati, D., & Saputra, M. A. (2022). Pelestarian tradisi dan budaya masyarakat transmigrasi etnis Jawa Propinsi Jambi (Kajian historis dan nilai budaya lokal kesenian Jatilan Unit V Sungai Bahar). *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2(1), 42–50.

---

<sup>15</sup> Nova Sari, Satyanta Parman, dan Sriyono, "Analisis Keruangan Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan di Daerah Eks-Transmigrasi Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi," *Geo-Image* 4, no. 2 (2015): 27.